

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Riska Vebri, Elsy Renie, and Dodon Alfiander. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna E-Wallet Dalam Sistem Pembayaran Digital Di Indonesia" 4, no. 3 (2023): 361–67. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i3.11741>.
- Anggreini, Rika. "Kemenkominfo Bakal Denda Rp500 Juta Platform Yang Fasilitas Judi Online." *teknologi.bisnis.com*, 2024. <https://teknologi.bisnis.com/read/20240525/101/1768240/kemenkominfo-bakal-denda-rp500-juta-platform-yang-fasilitas-judi-online>.
- antaranews.com. "Ekonom: Payment Gateway Perlu Teknologi Bendung Transaksi Judi Online," 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4832193/ekonom-payment-gateway-perlu-teknologi-bendung-transaksi-judi-online>.
- antaranews.com. "Pengamat Minta Sanksi Tegas Bagi Penyedia Payment Gateway Fasilitas Judi," 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4833593/pengamat-minta-sanksi-tegas-bagi-penyedia-payment-gateway-fasilitas-judi>.
- antaranews.com. "Pengamat Minta Sanksi Tegas Bagi Penyedia Payment Gateway Fasilitas Judi," 2025.
- Area, Universitas Medan. "Tanggung Jawab Hukum Dalam Wanprestasi Pada Perjanjian," 2023.
- Arrizal, Nizam Zakka, Muhammad Ali Fauzi, Kantor Notaris-ppat Muhammad, and Ali Fauzi. "Kepatuhan Hukum Sebagai Pencegahan" 6, no. 1 (2023): 1–11.
- Arrizal, Nizam Zakka, Siska Diana Sari, Sulistya Eviningrum, Bintang Ulya, Yudita Ayu, Widya Perdana, and Camelya Bella Saputri. "Juridical Review of Uncertified Land Rights Transfer (Land Has Not Been Registered)" 2024 (2024): 191–202. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i6.15267>.
- Baihaqi, Bari. "Fasilitasi Judi Online, Penyedia Payment Gateway Perlu Disanksi Tegas." *NERACA.CO.ID*, 2025. <https://www.neraca.co.id/article/219257/fasilitasi-judi-online-penyedia-payment-gateway-perlu-disanksi-tegas>.
- Barat, Lembang Mahakerret, Aerlangga Marfellino, Rafael Wullur, Edwin N Tinangon, and Anastasia E Gerungan. "Unsur-Unsur Pasal 1320 Kuhperdata," 2010.
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. "Sanksi Bagi Penyelenggara Payment Gateway Yang Tidak Berizin." *hukumonline.com*, 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-bagi-penyelenggara-ipayment-gateway-i-yang-tidak-berizin-lt5e4e9a682592a/>.
- Dan, Menikmati, and Kehilangan Hak. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," n.d.
- Dewan, Anggota, Gubernur Bank, and Bank Indonesia- Fast. "Dewan, Anggota, Gubernur Bank, and Bank Indonesia- Fast.," 2025.
- Dipanegara, Fathahillah. "Blueprint Sistem Pembayaran Ndongesia," n.d.
- Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: University Press, 2003.
- Elias, Rodrigo F. "Artikel Skripsi Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM :” X, no. 7 (2021): 16–26.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. 2nd ed. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- . *Perbuatan Melawan Hukum*. 2nd ed. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- H.S., Salim. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Herawati, Dwi Agustini, Agung Risdhianto, and Edy Saptono. "Indonesia Darurat Judi Online: Judi Online Sebagai Ancaman Nirmiliter" 5, no. 5 (2025): 1251–61.

- <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.991>.
- Hidayah, Nur. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Dompet Digital (E-Wallet) Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia" 2, no. 1 (2024): 40–56.
- Hukum, Perlindungan, Terhadap Pembebanan, Tambahan Kepada, Konsumen Dalam, Sistem Pembayaran, Program Studi, Hukum Program, Fakultas Hukum, and Universitas Islam Indonesia. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembebanan Biaya Tambahan Kepada Konsumen Dalam Sistem Pembayaran Qris (Quick Response Code Indonesian Standard)," 2025.
- Hutagaol, Mau, & Widodo. "Penyalahgunaan Kanal Pembayaran Untuk Transaksi Ilegal Immanuel Maykael Martono Reinhard Hutagaol 1 , Hedwig Adianto Mau 2 , Gatut Hendro Tri Widodo 3 DOI ;," 2026, 21–30.
- Ii, B A B. "Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian" 303, no. 1 (1946).
- Iii, B A B. "Pertanggung Jawaban Perbuatan Melawan Hukum Dalam KUHPerdara," n.d. ———. "Teori Perjanjian (Perdata)," n.d., 20–48.
- Iman, Rifqi Qowiyul. "Tanggung Jawab Keuangan Lembaga Atas Kerugian Nasabah," 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/tanggung-jawab-lembaga-keuangan-atas-kerugian-nasabah-0bfC>.
- Indonesia, Gubernur Bank. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/Pbi/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran Dengan," 2021.
- . "Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023," no. 13 (2023).
- INDONESIA, PRESIDEN REPUBLIK, and UNDANG-UNDANG. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008." *Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project*, 12, 1972. <https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972>.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. 9th ed. jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Inggiharti, Nonika. "Pengaruh Electronic Wallet Terhadap Kegiatan Keuangan Indonesia (Perbandingan Aplikasi Electronic Wallet Milik Perusahaan Financial Technology Terhadap Aplikasi Electronic Wallet Milik BUMN)" 5, no. 1 (2020): 74–88.
- Iv, Triwulan. "Lapo Ran Kelem Baga an Bank in Do Ne Sia," 2023.
- Jakarta. "Ekonom: Payment Gateway Perlu Teknologi Bendung Transaksi Judi Online." antaranews.com, 2025. *ekonom: Payment gateway perlu teknologi bendung transaksi judi online*.
- Journal, Clavia, and O F Law. "Clavia" 17, no. 2 (2019): 69–80.
- Jurnal, Artikel, and Sekar Revisi. "Analisis Asas Vicarious Liability Dalam Koneks Pertanggung Jawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank," 2023.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*., 19th ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, n.d.
- Kesatuan, Negara, and Republik Indonesia. "Dipimpin Oleh Hikmat," no. 16100 (2023).
- Konsisten, O J K, Dukung Upaya, Pemberantasan Aktivitas, and Judi Online. "Siaran Pers Ojk Konsisten Dukung Upaya Pemberantasan Aktivitas Judi," 2024.
- Mamudji, Soerjono Soekanto & Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Maritina. "Penerapan Hukum Terhadap Dugaan Fasilitasi Transaksi Judi Online Oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA) Adalah Untuk Menganalisis Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Fintech Dalam Kasus Ini ," 2, no. November (2025).
- Mugiono, Mariana, Astrid Athina Indradewi, and Vicariya Retnowati Boong. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Tindak Kejahatan Dan Perilaku Kriminal Anak Bawah Umur" 7, no. 1 (2025): 62–71. <https://doi.org/10.47637/legalita.v5i2.999.3>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. 3rd ed. Bandung: Citra Aditya Bakti,

2000.

- Nafis, Irfan, and Alaudin Wafa. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Judi Online Dalam Era Digital Kajian Regulasi Dan Implementasi," 2025.
- nasional.kontan.co.id. "PPATK: Hingga Awal November 2024, Transaksi Judi Online Tembus Rp 283 Triliun Artikel Ini Telah Tayang Di Kontan.Co.Id Dengan Judul 'PPATK: Hingga Awal November 2024, Transaksi Judi Online Tembus Rp 283 Triliun', Klik Untuk Baca: <https://Nasional.Kontan.C>," 2024.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/ppatk-hingga-awal-november-2024-transaksi-judi-online-tembus-rp-283-triliun>.
- "Pasal 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW)," n.d.
- Perdata, Hukum. *Tindakan Melawan Hukum*, n.d.
- Perundang-undangan, Perubahan Peraturan. "Evidence-Based Regulation : Pendekatan Ex-Post Review Dalam" 13 (2024): 357–69.
- Pidana, Undang Hukum. "PASAL 303 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERJUDIAN" V, no. 1 (2016): 116–23.
- Prasetyo, Sofyan Mufti, Rehan Gustiawan, Faarhat, and Fabian Rizzel Albani. "Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet Di Indonesia." *Jurnal Buletin Ilmiah Ilmu Komputer Dan Multimedia* 2, no. 1 (2024): 65–71. <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/biikma>.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. 1st ed. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Prof. Dr. Philipus Mandiri Hadjon, S.H. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, 2001. http://perpustakaan.fh-unkris.com:80/index.php?p=show_detail&id=727%0Ahttp://perpustakaan.fh-.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 6th ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA. "OJK Blokir 30 Ribu Rekening Terindikasi Judol Dalam 27 Bulan Terakhir," 2025. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/t9f3p6487/ojk-blokir-30-ribu-rekening-terindikasi-judol-dalam-27-bulan-terakhir>.
- Riani, Yuni. "Praktik Judi Online Berkembang Dengan Cara Dan Metode Baru." seluler.id, 2024. <https://seluler.id/2024/11/praktik-judi-online-berkembang-dengan-cara-dan-metode-baru/>.
- Riset, Jurnal, Rumpun Ilmu, Politik Humaniora, Richard Ratuwalu, and Sanny Dewayani. "Perlindungan Hukum Konsumen Fintech P2P Lending Akibat Penagihan Oleh Pihak Ketiga Sesuai POJK No . 22 Perlindungan Konsumen Melakukan Penagihan Kepada Konsumen Yang Menunggak Pembayaran . Sayangnya , Praktik" 5, no. September 2025 (2026).
- Sachio, Billy. "Pertanggungjawaban Hukum Influencer Judi Online Terhadap Masyarakat Yang Rugi Ditinjau Dari Hukum Perdata," 2024.
- Sari, Siska Diana. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Berdasarkan Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara Siska Diana Sari," 2018.
- Sari, Siska Diana, Nizam Zakka Arrizal, and Arief Budiono. "Honesty as the Fundamental Basis of Legal Education : A Study and Critique on ' Freedom to Learn ' Educational Policy," no. November (2020): 1–12.
- Syahputra, Rino Rahaditya. "Peran Teknologi Know Your Customer (KYC) Dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional : Aspek Keamanan Dan Hak Asasi Manusia," 2025, 77–84.
- "T Indak Pidana Judi Online : Studi Kasus Terhadap Platform Aplikasi" 5, no. 2 (2025): 17774–85.
- Widyasari, Friderica. "5 Perusahaan Dompot Digital Diduga Fasilitasi Judi Online, Ini

Tanggapan OJK." TEMPO.CO, Jakarta, 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/5-perusahaan-dompet-digital-diduga-fasilitasi-judi-online-ini-tanggapan-ojk-234193>.

Yustiavandana, Ivan. "PPATK: Transaksi Judi Online 2024 Tembus Rp 283 Triliun." TEMPO, 2024. <https://www.tempo.co/hukum/ppatk-transaksi-judi-online-2024-tembus-rp-283-triliun-1164927>.

Aktual.com. "RUU Perampasan Aset Tak Hanya Untuk Korupsi, DPR Minta Berkeadilan Dan Sasar Judi Online," 2026. <https://aktual.com/ruu-perampasan-aset-tak-hanya-untuk-korupsi-dpr-minta-berkeadilan-dan-sasar-judi-online/>.

detikNews. "Menggeser Paradigma Dari Perampasan Ke Pemulihan Aset," 2026. <https://news.detik.com/kolom/d-8512016/menggeser-paradigma-dari-perampasan-ke-pemulihan-aset>.

IDN Times. "PPATK Blokir 28 Ribu Rekening Terkait Judi Online Pada 2024," 2025. <https://www.idntimes.com/business/economy/ppatk-blokir-28-ribu-rekening-terkait-judi-online-sepanjang-2024-00-84mpg-www2hp>.

Kementerian Komunikasi dan Digital. "Komdigi Gandeng PPATK Blokir Rekening Putus Mata Rantai Judol," 2025. <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/komdigi-gandeng-ppatk-blokir-rekening-putus-mata-rantai-judol>.

MariNews Mahkamah Agung. "Restitusi, Pelindungan Bagi Korban Tindak Pidana," 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/restitusi-pelindungan-bagi-korban-tindak-pidana-01q>.

MariNews Mahkamah Agung. "Saatnya Negara Serius Merampas Aset Hasil Tindak Pidana," 2026. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/saatnya-negara-serius-merampas-aset-hasil-tindak-pidana-01d>.

majalahfakta.id. "RUU Perampasan Aset Diminta Tak Hanya Sasar Koruptor, Judi Online Juga Harus Dijerat," 2026. <https://majalahfakta.id/ruu-perampasan-aset-diminta-tak-hanya-sasar-koruptor-judi-online-juga-harus-dijerat/>.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lainnya, n.d.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. "PPATK Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi Online Senilai Rp600 Miliar Lebih," 2025. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1469/ppatk-blokir-5000-rekening-terkait-judi-online-senilai-rp600-miliar-lebih-gerakan-nasional-anti-pencucian-uang-jadi-langkah-efektif-perangi-judi-online.html.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Keppres No. 21 Tahun 2024, Menko Polhukam: Ada Tiga Tugas Utama Satgas Pemberantasan Judi Online," 2024. <https://polkam.go.id/keppres-no-21-tahun-2024-menko-polhukam-ada/>.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, LN.2011/No.39, TLN No.5204. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39133/uu-no-3-tahun-2011>.

CNBC Indonesia. "Gopay Hingga Dana Diduga Fasilitasi Judi Online, Bos OJK Bilang Gini," 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20241015173550-17-579975/gopay-hingga-dana-diduga-fasilitasi-judi-online-bos-ojk-bilang-gini>.

Gambling Commission. "Preventing Credit Card Use," 2024. <https://www.gamblingcommission.gov.uk/licensees-and-businesses/print/preventing-credit-card-use>.

GamCare. "Gambling on Credit Cards Banned in Great Britain," 2020. <https://www.gamcare.org.uk/news-and-blog/news/gambling-on-credit-cards-has-been-banned-in-great-britain/>.

Gulf News. "India Blocks 357 Illegal Offshore Online Money Gaming Platforms, 700 Under Scanner," 2026. <https://gulfnews.com/world/asia/india/india-blocks-357-illegal->

- offshore-online-money-gaming-platforms-700-under-scanner-1.500069150.
- JalanTikus. "5 Perusahaan Dompot Digital Fasilitas Judi Online, Gopay Dan OVO Termasuk!," 2024. <https://jalantikus.com/news/133850/perusahaan-dompot-digital-fasilitas-judi-online-gopay-ovo-termasuk/>.
- Lexology. "Remote Gambling Act 2014: MAS Issues New Payment Blocking Order Encompassing Merchant Banks and Finance Companies," 2015. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=653679a1-943e-4945-8199-76454d2f5d34>.
- Medianama. "India Blocks 242 More Gambling Sites, Offshore Use Still Rising," 2026. <https://www.medianama.com/2026/01/223-india-blocks-242-gambling-sites-total-above-7800/>.
- Monetary Authority of Singapore. "Payment Services Act," n.d. <https://www.mas.gov.sg/regulation/acts/payment-services-act>.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran, n.d.
- Philippine Daily Inquirer. "Marcos Signs Law Making Pogo Ban Permanent," 2025. <https://newsinfo.inquirer.net/2131571/marcos-signs-law-making-pogo-ban-permanent>.
- Rappler. "Marcos Announces Ban on Online Gambling Operations During SONA," 2024. <https://www.rappler.com/philippines/president-marcos-jr-orders-ban-offshore-gaming-operators-pogo-sona-july-2024/>.
- Tempo. "5 Perusahaan Dompot Digital Diduga Fasilitas Judi Online, Ini Tanggapan OJK," 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/5-perusahaan-dompot-digital-diduga-fasilitas-judi-online-ini-tanggapan-ojk-234193>.
- Tempo. "Fakta-Fakta Kemenkominfo Tegur 5 Layanan Dompot Digital Yang Dicurigai Fasilitas Judi Online," 2024. <https://www.tempo.co/ekonomi/fakta-fakta-kemenkominfo-tegur-5-layanan-dompot-digital-yang-dicurigai-fasilitas-judi-online-58882>.
- GoNews. "Menilik Harta Kajari Dan Hakim Ketua Saat Bos Judi Online Bebas Dari Hukum," 2025. <https://www.gonews.id/menilik-harta-kajari-dan-hakim-ketua-saat-bos-judi-online-bebas-dari-hukum/>.
- Hukumonline. "Awat! Rekening Bank Digunakan Untuk Judi Online, Siap-Siap Diblokir," 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/awat-rekening-bank-digunakan-untuk-judi-online--siap-siap-diblokir-lt657fb06bd3df9/>.
- Jerkin. "Analisis Yuridis Penggunaan Rekening Pribadi Orang Lain Dalam Tindak Pidana Judi Online," 2026. <http://jerkin.org/index.php/jerkin/article/download/4438/3350/26116>.
- Kabariku. "Bareskrim Eksekusi 133 Rekening Judi Online Rp 58,18 Miliar, Aset TPPU Diserahkan Ke Kejagung," 2026. <https://www.kabariku.com/2026/03/bareskrim-eksekusi-133-rekening-judi-online-rp-5818-miliar-aset-tppu-diserahkan-ke-kejagung/>.
- Penerapan Ketentuan Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Perkara Pidana No. 184/Pid.B/2023/PN.Mdn Jo. 1018/PID/2023/PT MDN), 2026. https://www.researchgate.net/publication/399846124_Penerapan_Ketentuan_Pidana_Pencucian_Uang_dalam_Tindak_Pidana_Judi_Online_Studi_Kasus_Perkara_Pidana_No_184PidB2023PNMdn_jo_1018PID2023PT_MDN.
- Tempo. "Jerat Pidana Bagi Pemilik Rekening Penampung Uang Judi Online," 2025. <https://www.tempo.co/hukum/jual-beli-rekening-judi-online-1167521>.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN.2010/No.122, TLN No.5164. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38547/uu-no-8-tahun-2010>.
- Wifa Shabilla, Tazkia Widia Ardani, Siti Nurhaliza, Dea Rizki Desambari, Zhafira Nasywa

Adriyanasta, Mutiara Laude Amabel, Tri Setiady, dan Meita Fadhilah. "Penerapan Hukum Terhadap Dugaan Fasilitas Transaksi Judi Online Oleh PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA)." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 2, no. 4 (2025).
<https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Presidensial/article/view/1296>.

Bacaini.id. "Dampak Judi Online Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," 2024.
<https://bacaini.id/dampak-judi-online-terhadap-kemiskinan-di-indonesia/>.

GoodStats. "Cerai Akibat Judi Online Terus Naik, Bagaimana Aksi Kemenag?," 2024.
<https://data.goodstats.id/statistic/cerai-akibat-judi-online-terus-naik-bagaimana-aksi-kemenag-hPr11>.

GoodStats. "Perceraian Akibat Judi Meningkatkan Tajam Pada 2025," 2026.
<https://goodstats.id/article/perceraian-akibat-judi-meningkat-tajam-pada-2025-DxRDg>.

Hukumonline. "Hukum Judi Online Kian Berat, Ini Aturan Terbaru!," 2025.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026/>.

JDIH Kabupaten Sukoharjo. "Jerat Hukum Membuat Website Judi Online."
<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/jerat-hukum-membuat-website-judi-online>.

Kompas. "Judi Online Jadi Ancaman Baru Kemiskinan Di Indonesia," 2024.
<https://nasional.kompas.com/read/2024/11/29/07374001/judi-online-jadi-ancaman-baru-kemiskinan-di-indonesia?page=all>.

MariNews Mahkamah Agung. "RKUHAP Resmi Disahkan Dalam Rapat Paripurna DPR," 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/rkuhap-resmi-disahkan-dalam-rapat-paripurna-dpr-0Ay>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.